



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 PESAWAT 6348, 3500849 FAKSIMILE (021) 3500847; SITUS www.kemenkeu.go.id

Nomor : S-~~239~~/SJ.6/2018

27 Maret 2018

Sifat : Sangat Segera

Hal : Penyampaian Buku Kumpulan Penelitian Komunikasi Publik Edisi VII 2017

Yth. (Daftar Terlampir)

Bersama ini kami sampaikan Buku Kumpulan Penelitian Komunikasi Publik Edisi VII 2017 yang disusun oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Selama tahun 2017, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi telah menyelesaikan empat kegiatan penelitian, yaitu riset pemetaan *influencer* media sosial, riset *stakeholder mapping*, audit laporan analisis berita mingguan, dan audit sinergi humas pemerintah. Keempat hasil penelitian tersebut ditulis kembali dalam bahasa populer agar mudah dipahami dan disajikan dalam bentuk buku kumpulan penelitian. Tahun ini adalah tahun ketujuh penerbitan buku kumpulan penelitian. Sesuai dengan materi penelitian, buku yang terdiri atas empat bab ini diberi judul Strategi Meraih Dukungan Publik.

Kami berharap buku ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya kalangan internal Kementerian Keuangan dan dapat dijadikan referensi dalam mengambil keputusan demi mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Atas perhatian Ibu/Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro,

Nufransa Wira Sakti

NIP 19700811 199503 1 002

Daftar Penerima Buku Kumpulan Penelitian Komunikasi Publik Edisi VII 2017

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan
3. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
4. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
5. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
6. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara
7. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
8. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi Keuangan Internasional
9. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal
10. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi
11. Sekretaris Jenderal
12. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
13. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
14. Kepala Biro Hukum
15. Kepala Biro Bantuan Hukum
16. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
17. Kepala Biro Perlengkapan
18. Kepala Biro Umum
19. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
20. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
21. Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik
22. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
23. Sekretaris Pengadilan Pajak
24. Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
25. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan
26. Direktur Jenderal Anggaran
27. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran
28. Direktur Sistem Penganggaran
29. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
30. Direktur Anggaran I
31. Direktur Anggaran II
32. Direktur Anggaran III
33. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak
34. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran
35. Tenaga Pengkaji Bidang PNB

36. Direktur Jenderal Pajak
37. Sekretaris Direktorat Jenderal
38. Direktur Peraturan Perpajakan I
39. Direktur Peraturan Perpajakan II
40. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
41. Direktur Intelijen dan Penyidikan
42. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
43. Direktur Keberatan dan Banding
44. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
45. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
46. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
47. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
48. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
49. Direktur Transformasi Proses Bisnis
50. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
51. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea & Cukai
52. Direktur Teknis Kepabeanan
53. Direktur Fasilitas Kepabeanan
54. Direktur Cukai
55. Direktur Penindakan dan Penyidikan
56. Direktur Audit
57. Direktur Kepabeanan Internasional
58. Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan & Cukai
59. Direktur Informasi Kepabeanan & Cukai
60. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai
61. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
62. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
63. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
64. Direktur Jenderal Perbendaharaan
65. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
66. Direktur Pelaksanaan Anggaran
67. Direktur Pengelolaan Kas Negara
68. Direktur Sistem Manajemen Investasi
69. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
70. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
71. Direktur Sistem Perbendaharaan
72. Direktur Transformasi Perbendaharaan

73. Tenaga Pengkaji Perbendaharaan
74. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
75. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
76. Direktur Barang Milik Negara (BMN)
77. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
78. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
79. Direktur Penilaian
80. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
81. Direktur Lelang
82. Direktur Hukum dan Humas
83. Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
84. Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
85. Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan
86. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
87. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
88. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
89. Direktorat Dana Perimbangan
90. Direktorat Pembiayaan, dan Kapasitas Daerah
91. Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
92. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
93. Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
94. Direktur Pinjaman dan Hibah
95. Direktur Surat Utang Negara
96. Direktur Strategi dan Portfolio Utang
97. Direktur Pembiayaan Syariah
98. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
99. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
100. Sekretaris Inspektorat Jenderal
101. Inspektur Bidang I
102. Inspektur Bidang II
103. Inspektur Bidang III
104. Inspektur Bidang IV
105. Inspektur Bidang V
106. Inspektur Bidang VI

107. Inspektur Bidang VII
108. Inspektur Bidang Investigasi
109. Kepala Badan Kebijakan Fiskal
110. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
111. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
112. Kepala Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
113. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi dan Makro
114. Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
115. Kepala Pusat Kebijakan Kerjasama Internasional (Kebijakan Regional dan Bilateral)
116. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
117. Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF
118. Peneliti Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF
119. Peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi dan Makro BKF
120. Peneliti Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF
121. Peneliti Pusat Kebijakan Kerjasama Internasional (Kebijakan Regional dan Bilateral) BKF
122. Peneliti Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF
123. Kepala BPPK
124. Sekretaris Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan
125. Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengembangan SDM
126. Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
127. Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pajak
128. Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bea dan Cukai
129. Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Umum
130. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
131. Direktur STAN
132. Perpustakaan Kementerian Keuangan
133. Perpustakaan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
134. Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
135. Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
136. Perpustakaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
137. Perpustakaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
138. Perpustakaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)
139. Perpustakaan Inspektorat Jenderal / Puspita
140. Perpustakaan Badan Kebijakan Fiskal
141. Perpustakaan Unit Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
142. Perpustakaan Unit Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
143. Perpustakaan DJKN

144. Kepala Pusat Investasi Pemerintah
145. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
146. Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar
147. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal Kantor Pusat DJP
148. Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi
149. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak
150. Kepala Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
151. Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
152. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
153. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II
154. Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau
155. Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
156. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
157. Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
158. Kepala Kantor KPP Pratama Bukittinggi
159. Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat
160. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat
161. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan
162. Kepala KPP Madya Jakarta Selatan
163. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur
164. Kepala KPP Madya Jakarta Timur
165. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara
166. Kepala KPP Madya Jakarta Utara
167. Kepala Kanwil DJP Banten
168. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I
169. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II
170. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I
171. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II
172. Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
173. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I
174. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II
175. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III
176. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat
177. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
178. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur
179. Kepala KPP Madya Balikpapan
180. Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

181. Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
182. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara
183. Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku
184. Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus
185. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu
186. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Dua
187. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga
188. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat
189. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Lima
190. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam
191. Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa
192. Kepala KPP Badan dan Orang Asing
193. Kepala KPP Minyak dan Gas Bumi
194. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
195. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu
196. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua
197. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga
198. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat
199. Kepala KPU Batam
200. Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara
201. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan
202. Kepala Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat
203. Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
204. Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan
205. Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten
206. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta
207. Kepala KPPBC Madya Pabean Merak
208. Kepala KPPBC Madya Pabean Tangerang
209. Kepala Kanwil DJBC Jakarta
210. Kepala KPPBC Madya Pabean Jakarta Bandara Halim Perdanakusuma
211. Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat
212. Kepala KPPBC Madya Pabean Bekasi
213. Kepala KPPBC Madya Pabean Bogor
214. Kepala KPPBC Madya Pabean Purwakarta
215. Kepala KPPBC Madya Bandung
216. Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
217. Kepala KPPBC Tipe A1 Tanjung Emas

218. Kepala KPPBC Madya Cukai Kudus
219. Kepala KPPBC Madya Pabean Surakarta
220. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I
221. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
222. Kepala KPPBC Madya Pabean Pasuruan
223. Kepala KPPBC Madya Pabean Juanda
224. Kepala KPPBC Gresik
225. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II
226. Kepala KPPBC Madya Cukai Malang
227. Kepala KPPBC Madya Cukai Kediri
228. Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT
229. KPPBC Madya Pabean Ngurah Rai
230. Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
231. Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
232. Kepala Kanwil DJBC Sulawesi
233. Kepala Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat
234. Kepala KPU Tanjung Priok
235. Kepala Kanwil I DJPBn Banda Aceh
236. Kepala Kantor Wilayah II Ditjen PBN Medan
237. Kepala Kantor Wilayah III Ditjen PBN Padang
238. Kepala Kantor Wilayah IV Ditjen PBN Pekanbaru
239. Kepala Kantor Wilayah V Ditjen PBN Jambi
240. Kepala Kantor Wilayah VI Ditjen PBN Palembang
241. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen PBN Bandar Lampung
242. Kepala Kantor KPPN Bandar Lampung
243. Kepala Kantor Wilayah VIII Ditjen PBN Bengkulu
244. Kepala Kantor Wilayah IX Ditjen PBN Pangkalpinang
245. Kepala Kantor Wilayah X Ditjen PBN Serang
246. Kepala Kantor KPPN Serang
247. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen PBN DKI Jakarta
248. Kepala Kantor KPPN Jakarta I
249. Kepala Kantor KPPN Jakarta II
250. Kepala Kantor KPPN Jakarta III
251. Kepala Kantor KPPN Jakarta IV
252. Kepala Kantor KPPN Jakarta V
253. Kepala Kantor KPPN Khusus Jakarta VI
254. Kepala Kantor Wilayah XII Ditjen PBN Bandung

255. Kepala Kantor Wilayah XIII Ditjen PBN Semarang
256. Kepala Kantor Wilayah XIV Ditjen PBN Yogyakarta
257. Kepala Kantor KPPN Yogyakarta
258. Kepala Kantor KPPN Wates
259. Kepala Kantor KPPN Wonosari
260. Kepala Kantor Wilayah XV Ditjen PBN Surabaya
261. Kepala Kantor Wilayah XVI Ditjen PBN Pontianak
262. Kepala Kantor Wilayah XVII Ditjen PBN Palangkaraya
263. Kepala Kantor Wilayah XVIII Ditjen PBN Banjarmasin
264. Kepala Kantor Wilayah XX Ditjen PBN Denpasar
265. Kepala Kantor Wilayah XXI Ditjen PBN Mataram
266. Kepala Kantor Wilayah XXII Ditjen PBN Kupang
267. Kepala Kantor Wilayah XXIII Ditjen PBN Makassar
268. Kepala Kantor Wilayah XXIV Ditjen PBN Palu
269. Kepala Kantor Wilayah XXV Ditjen PBN Kendari
270. Kepala Kantor Wilayah XXVI Ditjen PBN Gorontalo
271. Kepala Kantor Wilayah XXVII Ditjen PBN Manado
272. Kepala Kantor Wilayah XXVIII Ditjen PBN Ternate
273. Kepala Kantor KPPN Ternate
274. Kepala Kantor KPPN Tobelo
275. Kepala Kantor Wilayah XXIX Ditjen PBN Ambon
276. Kepala Kantor Wilayah XXX Ditjen PBN Jayapura
277. Kepala Kantor KPPN Jayapura
278. Kantor KPPN Biak
279. Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh
280. Kepala Kanwil II DJKN Medan
281. Kepala Kanwil III DJKN Pekanbaru
282. Kepala Kanwil IV DJKN Palembang
283. Kepala Kanwil V DJKN Bandar Lampung
284. Kepala Kanwil VII DJKN Jakarta
285. Kepala Kanwil IX DJKN Semarang
286. Kepala Kanwil X DJKN Surabaya
287. Kepala Kanwil XI DJKN Pontianak
288. Kepala KPNL Pontianak
289. Kepala KPNL Singkawang
290. Kepala Kanwil XII DJKN Banjarmasin
291. Kepala Kanwil XIII DJKN Samarinda

292. Kepala KANWIL XIV DJKN Denpasar
293. Kepala KANWIL XV DJKN Makasar
294. Kepala KANWIL XVI DJKN Manado
295. Kepala KANWIL XVII DJKN Jayapura
296. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Yogyakarta
297. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya II
298. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Ambon
299. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Balikpapan
300. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Banda Aceh
301. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung
302. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Biak
303. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Denpasar I
304. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Denpasar II
305. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura
306. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang
307. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Makassar
308. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado
309. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Medan
310. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang
311. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang I
312. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II
313. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Singaraja
314. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Sorong
315. Kepala Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I
316. Balai Diklat Keuangan Palembang
317. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
318. Balai Diklat Keuangan Malang
319. Balai Diklat Keuangan Balikpapan
320. Balai Diklat Keuangan Medan
321. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru
322. Balai Diklat Keuangan Cimahi
323. Balai Diklat Keuangan Denpasar
324. Balai Diklat Kepemimpinan Magelang
325. Balai Diklat Keuangan Manado
326. Balai Diklat Keuangan Makassar
327. Balai Diklat Keuangan Pontianak